



# Comparative Study of Sharia Economic Practices and Socialist Economics

(Studi Perbandingan Praktek Ekonomi Syariah dan Ekonomi Sosialis)

Sofyan Abas <sup>1</sup>✉

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate, Indonesia.

✉ Email: [sofyanabas36@yahoo.com](mailto:sofyanabas36@yahoo.com)

Info Artikel :  Artikel Penelitian  Artikel Pengabdian  Riview Artikel

Diterima : 25 Mei 2026, Disetujui : 7 Juni 2026, Publikasi On-Line : 8 Juni 2026

## Abstract

A country's economic system constitutes the framework, rules, and mechanisms used to manage production, distribution, consumption, and services to achieve prosperity. The fundamental differences between economic systems lie in how factors of production, resources, and ownership are regulated. In some systems, individuals possess all factors of production, while in others, resources are held collectively by the state. Islamic economics, as an alternative system, emphasizes principles based on the Qur'an and Sunnah, advocating justice, equitable distribution, and a profit-sharing system, contrasting with socialist economics which is grounded in collectivism and state control. This paper compares both systems in terms of philosophy, mechanisms, and their impacts on growth and social justice, demonstrating that Islamic economics has consistent characteristics and adaptability over time, capable of balancing economic growth with social equity.

**Keywords:** Comparison; Islamic Economics; Socialist Economics.

### I. PENDAHULUAN

Model perekonomian sebuah bangsa atau negara yang berbasis mazhab sosialis memasuki abad ke 21 sesungguhnya semakin kuat pengaruhnya, dan sosialis dapat mengukuhkan hegemoninya menawarkan sistem ekonomi modern gaya baru melalui *welfare state*. Gagasan awal tentang kesetaraan dan kepemilikan bersama sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Plato, dalam bukunya *The Republic*, Plato mengusulkan konsep kepemilikan bersama dikalangan kelas penguasa agar demi dapat menjaga keadilan dan stabilitas masyarakat disebuah negara. Walaupun belum dianggap sebagai sosialisme modern namun pemikiran tersebut telah mencerminkan sebuah gagasan awal tentang penghapusan kepemilikan pribadi demi kebaikan bersama.

Sistem ekonomi suatu negara atau bangsa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ideologi, sistem kepercayaan, pandangan hidup,

lingkungan geografis, politik, dan budaya sosial. Dalam konteks ini, terdapat berbagai aliran ekonomi yang berkembang secara global, termasuk ekonomi syariah dan ekonomi sosialis. Ekonomi syariah, sebagai sistem ekonomi alternatif yang dikembangkan berdasarkan ajaran Islam, memiliki karakter dan prinsip yang konsisten sepanjang waktu, bersumber dari Al-Qur'an dan Assunnah. Sistem ini berorientasi pada sektor riil dan berbasis pada sistem bagi hasil, berbeda dengan mazhab sosialisme yang cenderung berfokus pada sistem bunga (*ribawi*). Di lain pihak, ekonomi sosialis menitikberatkan pada kepemilikan kolektif dan pemerataan kekayaan guna mengurangi kesenjangan ekonomi. Walaupun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan keagamaan seperti solidaritas, keadilan sosial, dan kepedulian terhadap kaum miskin sudah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat, termasuk dalam praktik keagamaan. Sebagai contoh, praktik

zakat, infak, dan wakaf dalam Islam serta charity dalam Kekristenan merupakan bentuk moral sosial yang menegaskan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian communal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah dan ekonomi sosialis memiliki beberapa kesamaan dalam hal upaya mencapai kesejahteraan bersama dan pemerataan kekayaan. Sistem ekonomi syariah tidak hanya menekankan aspek keberlanjutan ekonomi, tetapi juga keadilan distribusi dan moralitas, serta tidak mengandung unsur riba yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Sementara itu, ekonomi sosialisme berusaha menghapuskan hak milik pribadi untuk mengurangi ketimpangan melalui kontrol negara terhadap sumber daya dan distribusi kekayaan.

Ekonomi syariah yang berkomitmen terhadap aspek sosial menerapkan tanggung jawab sosial tidak hanya dalam lembaga ekonomi, tetapi juga dalam lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari implementasinya. Sistem ini menyajikan makna sosial dan etika yang baru, di luar faktor institusionalisme dan pemikiran sosiologis. Ekonomi syariah dapat memberikan dimensi normatif yang mendukung kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, krisis ekonomi yang sering terjadi di berbagai negara, baik di masa lalu maupun saat ini, sering kali disebabkan oleh praktik dari sistem ekonomi konvensional, termasuk aliran ekonomi sosialis, yang menempatkan sistem bunga sebagai instrumen utama untuk memperoleh keuntungan dalam setiap transaksi ekonomi. Sistem ekonomi sosialisme, di sisi lain, memisahkan secara tegas antara intervensi agama dengan aktivitas maupun transaksi ekonomi dan keuangan.

Ekonomi konvensional berasumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. *Rationality assumption*. Menurut Roger LeRoy Miller adalah *individuals do not intentionally make decisions that would leave them worse off*, bahwa manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya memaksimalkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat. Dalam perspektif ekonom dan keuangan syariah Fathurrahman Djamil misalnya, bahwa efisiensi, rasionalisasi mekanisasi dan sebagainya itu merupakan keharusan dalam proses perkembangan ekonomi dunia, hal ini mungkin bisa dapat menimbulkan benturan serta ketegangan dengan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat disebuah negara atau bangsa.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Artinya, fokus utama penelitian adalah menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena yang sedang terjadi, bukan untuk mengukur atau menguji hubungan statistik antar variabel. Penelitian ini bertujuan menelusuri dan memahami dominasi praktek ekonomi konvensional berbasis mazhab ekonomi sosialis dibandingkan dengan praktek ekonomi syariah yang terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan menggali makna, arti, serta konteks sosial dan ekonomi dari fenomena tersebut secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini berorientasi untuk membandingkan dan mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan antara praktik ekonomi syariah dan ekonomi sosialis. Fokusnya bukan pada pembuktian hubungan sebab-akibat, melainkan pada penafsiran mendalam terhadap fakta, realita, dan masalah tertentu yang terkait, sebagaimana yang dikemukakan oleh J.R Raco (2010).

Dalam penelitian ini, sumber utama data adalah data sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Data sekunder tersebut diperoleh secara tidak langsung dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, majalah, makalah ilmiah, artikel, media daring, surat kabar nasional, dan sumber informasi lain yang relevan. Peneliti akan melakukan kajian secara menyeluruh dan mendalam terhadap sumber-sumber tersebut, kemudian mengintegrasikannya ke dalam kerangka teori untuk mendukung studi perbandingan antara praktik aliran ekonomi syariah dan mazhab ekonomi sosialis. Pendekatan ini bertujuan memastikan analisis yang komprehensif dan objektif guna memperkuat temuan penelitian.

Peneliti akan dapat menempuh sebuah langkah komparatif yaitu dengan membandingkan pandangannya para tokoh-tokoh seputar objek pembahasan journal peneliti guna menangkap sisi persamaan dan perbedaannya, dan sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif analisis. Oleh karena itu, penelitian ini pihak peneliti akan berupaya memberikan gambaran yang deskriptif dan sekaligus mengeksplorasi secara mendalam terhadap setiap aspek yang berhubungan dengan dominasi aliran ekonomi sosialis atas ekonomi syariah dalam aktifitas praktek transaksi-transaksi ekonominya termasuk transaksi keuangan yang terjadi

dinegara-negara dunia dewasa ini termasuk di negara Indonesia.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Diskursus Tentang Ekonomi Syariah Dan Ekonomi Sosialis

##### Sejarah Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah telah hadir sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam. Praktik dan prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah ini mulai diterapkan oleh Nabi dan para khalifah, yang kemudian melahirkan peradaban besar dalam bidang ekonomi. Sejarah panjang ini diperkaya oleh pemikiran tokoh-tokoh ulama terkemuka seperti Abu Yusuf, Imam Ghazali, Ibn Khaldun, dan Ibn Taimiyah, yang mengemukakan berbagai teori penting mengenai kebijakan fiskal, keuangan publik, pengelolaan pasar, hingga keadilan ekonomi. Pada masa lampau, sumber utama pendapatan negara meliputi zakat, khums, kharaj, dan jizyah, yang dikelola secara transparan melalui lembaga keuangan syariah dan didistribusikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan. Warisan ini menunjukkan betapa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi, tetapi sebuah jalan hidup yang berlandaskan keadilan dan moralitas, sebagai fondasi keberlangsungan umat dan bangsa.

Sejarah telah mencatat, bahwa ada begitu banyak tokoh-tokoh Islam dengan pemikiran yang spektakuler dalam bidang ekonomi, antara lain adalah Abu Yusuf (182/798) yang menggagas teori kebijakan fiskal, keuangan publik, hingga mekanisme pasar. Imam Ghazali (450-505 H) yang menggagas persoalan mata uang, pasar, dan pajak. Sementara itu Ibn Khaldun (732-808 H) mengkaji soal pengangguran, keuangan publik, hingga persoalan perdagangan internasional. Tak lupa pula Ibn Taimiyah (728 H - 1328 M) yang mengupas tentang fondasi moral serta bagaimana masyarakat, harga yang wajar dan adil, pengawasan pasar, keuangan negara, serta peran negara dalam masalah ekonomi. Selain para ulama dan pemikir di atas, tentunya masih banyak lagi ulama-ulama dan para pemikir Islam yang berkontribusi dalam bidang ekonomi syariah seperti al-Maqrizi, al-Mawardi, Harun al-Rasyid dan lainnya. Pada awal perkembangan dunia Islam sumber utama pendapatan negara antara lain adalah *khums*, *zakat*, *kharaj*, dan *jizyah*. Pendapatan negara pada masa Rasulullah termasuk ZISWAF (zakat, infak, sadakah, wakaf) itu disimpan pada lembaga *baitul ma'at* atau lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu

tertentu untuk selanjutnya dapat didistribusikan kepada masyarakat atau mereka yang membutuhkan.

##### Sestim Ekonomi Syariah

Mengkaji sistem atau aliran idiologi ekonomi syariah haruslah holistik komprehensif. Hal ini, selain memerlukan sebuah pemahaman tentang Islam yang kaffah juga pemahaman pada pengetahuan ilmu ekonomi secara umum. Selanjutnya, jika keterbatasan manusia atas pemahaman tentang Islam akan berakibat tidak dipahaminya sistem ekonomi syariah secara holistic komprehensif dari aspek fundamental ideologis, pemahaman konsep serta aplikasinya pada tataran praktisnya.

Ekonomi syariah tidak hanya menekankan pada aspek pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan keadilan distribusinya. Sistem pembangunan ekonomi menurut ekonomi syariah memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan konsep ekonomi lainya termasuk ekonomi sosialis. Ekonomi syariah sebagai sebuah sistem alternatif telah memiliki karakter berbeda, *genuine*, dan tidak berubah sepanjang masa. Menurut Yusuf Qardawi, ekonomi syariah akan selalu menetapkan secara global masalah-masalah yang mengalami perubahan akibat berubahnya lingkungan dan perubahan jaman, tempat dan waktu. Dalam ekonomi syariah, seluruh unsur dan aspek yang membentuk sistem ekonomi saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada keselarasan antara prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai moral serta budaya masyarakat yang menjalankannya. Tujuan utama ekonomi syariah adalah untuk mencapai keberhasilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan, tidak hanya dari aspek materi, tetapi juga dari aspek spiritual dan sosial, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta keadilan sosial berdasarkan ajaran Islam.

Menurut Deliarnov, sistem perekonomian suatu negara tidak semata-mata dipengaruhi oleh doktrin atau aliran ekonomi yang dianut, tetapi juga oleh nilai-nilai dasar yang tumbuh dalam masyarakatnya—seperti adat istiadat, norma sosial, kepercayaan, dan ideologi hidup. Nilai-nilai ini menjadi fondasi yang membentuk karakter ekonomi dan cara masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada aspek teoretis, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh penerapan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat setempat.



Gambar 1. Aliran dana melalui sistem keuangan syariah

Merujuk dari pada Gambar 1, tampaklah jelas bahwa keberadaan lembaga keuangan dalam ekonomi syariah sebagai aplikasi dari pada sistem ekonomi syariah adalah sangat vital karena kegiatan bisnis dan roda perekonomian suatu bangsa tidak akan berjalan tanpa adanya lembaga *intermediary* atau lembaga keuangan syariah. Ekonomi syariah diarahkan pada penerapan prinsip ekonomi sosial yang seragam, di mana kepentingan umat manusia menjadi prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan individu atau pribadi (*self-interest*). Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiah yang menyatakan bahwa masalahat al-‘ammah (kepentingan umum) harus didahulukan daripada masalahat al-khâs (kepentingan khusus). Nilai-nilai instrumental dalam sistem ekonomi berbasis syariah meliputi zakat, larangan riba, kerjasama, dan jaminan sosial, semuanya didasarkan pada hukum dan prinsip agama Islam..

**Sejarah Ekonomi Sosialis**

Ekonomi sosialis, gagasan awal tentang kesetaraan dan kepemilikan bersama sudah muncul sejak zaman Yunani kuno, misalnya Plato, dalam bukunya *The Republic*, Plato mengusulkan konsep kepemilikan bersama dikalangan kelas penguasa demi menjaga keadilan dan stabilitas masyarakat. Walaupun belum dianggap sebagai sosialisme modern, pemikiran Plato tersebut mencerminkan gagasan awal tentang penghapusan kepemilikan pribadi demi kebaikan bersama. Di bumi benua eropa pernah ada suatu zaman pernah terjadi dimana tidak ada pengakuan terhadap hak milik manusia, melainkan yang ada hanyalah milik Tuhan dipersembahkan kepada pemimpin agama sebagai wakil dari Tuhan. Pada zaman itu terkenal dengan *sistem universalisme*. Sistem tersebut dapat ditegakkan atas dasar keyakinan atau kepercayaan kaum agamawan, mereka berpandangan bahwa ‘semua datang dari Tuhan,

senua milik Tuhan dan harus dipulangkan kepada Tuhan.

Sejatunya pemikiran aliran atau idiologi sosialisme modern berkembang pesat pada abad ke-18 dan 19 disaat terjadinya revolusi industri di negara Inggris dan Eropa. Pada masa tersebut, pabrik-pabrik industri telah bermunculan, dan produksi meningkat tajam, tetapi terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap kaum buruh. Kesenjangan antara kelas pemilik modal (*borjuis*) dan kelas pekerja (*prolet ar*), sehingga yang muncul adalah disparitas semakin menajam. Berikutnya adalah sosialisme ilmiah yang dikembangkan oleh *Karl Marx dan Friedrich Engels*. Mereka sesungguhnya mengkritik mazhab sosialisme utopis karena tidak memiliki analisis ilmiah tentang masyarakat dan tidak menawarkan jalan nyata menuju perubahan. *Marx dan Engels* memandang bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas.

Kapitalisme akan runtuh karena kontradiksi internalnya, dan kelas pekerja akan mengambil alih alat produksi, menciptakan masyarakat sosialis, dan akhirnya menuju komunisme. Ide mereka telah dituangkan dalam *Manifesto Komunis* (1848) dan *Das Kapital* (1867). Marxisme sesungguhnya telah menjadi dasar sebuah teori aliran atau mazhab ekonomi sosialisme modern yang paling berpengaruh didunia hingga dewasa ini.

**Sistim Sosialisme dan Krisi Ekonom Dunia**

Konsep dasar sosialisme, sebuah sistem ekonomi yang menekankan pada kepemilikan bersama atau kontrol negara atas alat-alat produksi, seperti tanah, pabrik, sumber daya alam, dan infrastruktur strategis. Tujuan utamanya adalah pemerataan distribusi kekayaan agar tidak hanya dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu saja. Banyak masyarakat diberbagai belahan dunia hidup dengan sistem komunal, dimana tanah dan sumber daya mereka kelola secara bersama untuk kepentingan komunitasnya.

Misalnya, adanya sistem *tanah ulayat* di negara kita Indonesia yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat secara turun temurun. Praktik tersebut telah menunjukkan bahwa adanya konsep kepemilikan bersama yang sejalan dengan nilai aliran *socialism*. Sistem ekonomi konvensional berbasis sosialisme yang dilaksanakan oleh sebahagian besar pelaku ekonomi didunia telah menghadapi masa krisis dan reevaluasi. Kritikan dari Karl Max sampai pada 1940 bahkan diawal abad ke-21 kritikan tersebut semakin meluas. Selanjutnya, kritikan senada juga dari Joseph Schumpeter dan kawan-kawan sampai Joseph Stigliz.

**Tabel 1.** Negara-Negara Didunia Krisis Ekonomi

Tahun Krisis	Negara Krisis Ekonomi
1920	Jepang mengalami depresi ekonomi
1922	Jerman mengalami hyperinflasi
1927	Jepang menutup 37 bank
1931	Austria mengalami krisis perbankan
1944	Prancis dan Hungaria mengalami hyperinflasi dan krisis moneter
1945	Jerman mengalami hyperinflasi
1973	Inggris mengalami krisis perbankan
1980	Krisis utang di Polandia
1982	Krisis utang di Mexico, Argentina, Brazil dan Venezuela
1987	The great crash di US
1994	Mexico mengalami krisis; akibat kebijakan finansial yang tidak tepat
1997	Krisis keuangan di Asia Tenggara; Thailand, Malaysia dan Indonesia
1998	Krisis keuangan di Korea dan Rusia
1999	Krisis keuangan di Brazil dn Argentina

Di Indonesia misalnya, pada awal 1998 telah dilanda krisis ekonomi moneter dan krisis global pada tahun 2008. Krisis tersebut sesungguhnya membuat pemerintah pusat melakukan likuiditas terhadap institusi ekonomi seperti lembaga keuangan konvensional yang mengalami krisis, kolaps sehingga mereka harus merger bahkan ditutup. Kondisi krisis tersebut membuat Indonesia harus membutuhkan kehadiran dari pada negara-negara donor seperti *IMF*, *World Bank* dan badan donor keuangan lainnya didunia. Sesungguhnya krisis ekonomi moneter yang terjadi ditahun 1998 harus dapat

dipandang sebagai sebuah pengalaman bagi negara-negara ASEAN terutama untuk negara Indonesia didalam membangun masa depan dari pada fundamental ekonominya. Oleh karena itu, ekonomi syariah lahir dan hadir sebagai sebuah solusi alternatif dan sebuah anti tesis atas praktek ekonomi konvensional selama ini termasuk ekonomi sosialis.

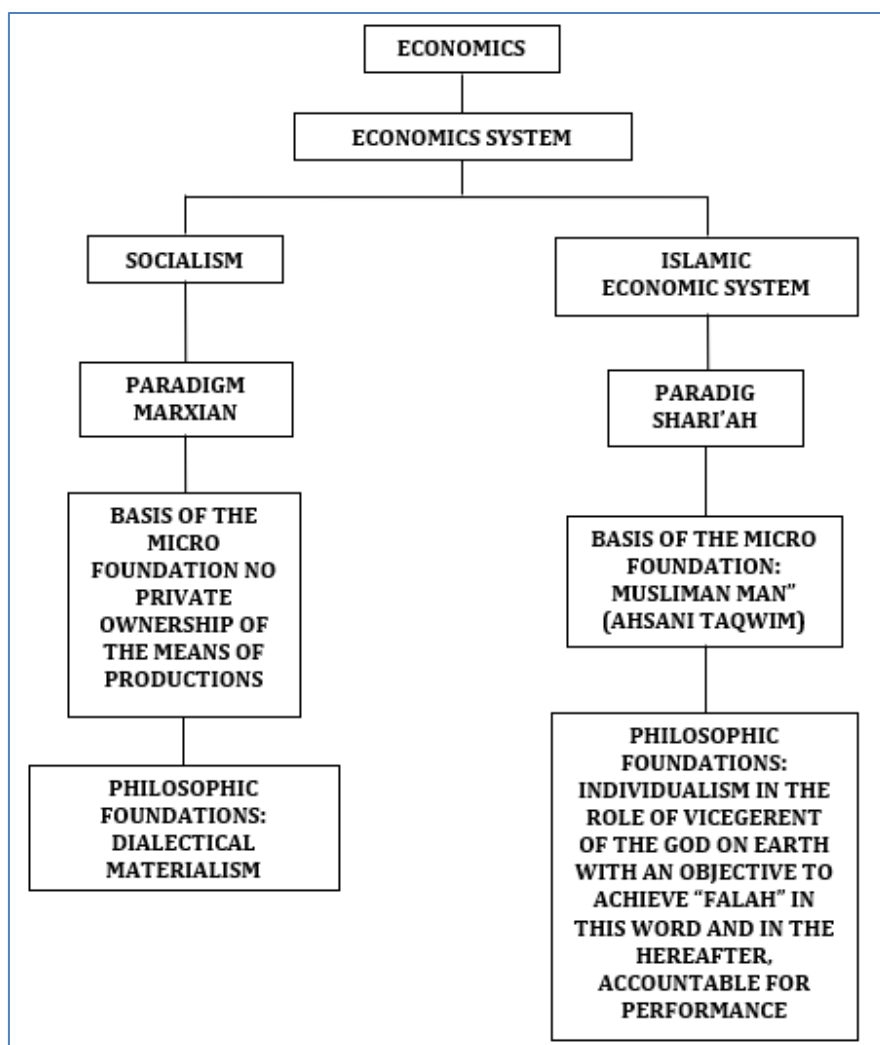
**Hasil Studi Perbandingan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Sosialis**

Menurut Mudrajad Kuncoro, bahwa Islam adalah agamaa *way of life* dalam konteks bertransaksi ekonomi dan keuangan. Sedangkan menurut Ma’ruf Amin, bahwa ajaran Islam akan selalu mampu merespon segala bentuk fenomena serta dinamika dalam transaksi ekonomi dan keuangan yang muncul ditengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, menurut A. K. Fathi Usman, bahwa ekonomi yang berbasis konvensional termasuk ekonomi sosialis sesungguhnya menjurus kearah segi rohani dan moral tetapi tidak meletakkannya kedua hal tersebut sebagai suatu yang paling berharga.

Dalam sistem ekonomi sosialisme, terdapat paradigma dasar yang berlandaskan pada fondasi mikro dan landasan filosofis. Dasar mikro sendiri merujuk pada konsep dasar yang mendasari perilaku individual dan keputusan ekonomi, sementara landasan filosofis berkaitan dengan keyakinan dan pandangan dunia yang menjadi dasar dari sistem tersebut. Menurut sistem ekonomi syariah yang berbasis hukum Islam, juga memiliki unsur-unsur yang serupa, yaitu berdasarkan aturan-aturan syariah dan prinsip moral yang kokoh. Keduanya menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah dapat disejajarkan dengan ekonomi sosialisme dari segi struktur dan fondasinya. Pengkajian ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah telah memenuhi semua persyaratan yang diperlukan agar dapat diklasifikasikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang berlaku di suatu bangsa atau negara. Dengan kata lain, ekonomi syariah memiliki landasan teoritis dan filosofis yang kuat, sehingga layak dipandang sebagai sistem ekonomi yang lengkap dan sah secara keilmuan.

Gambar 2, membuktikan bahwa sistem ekonomi berbasis syariah dari sudut pandang keilmuan dapat disejajarkan dengan ekonomi sosialisme sebagai sebuah sistem. Hal demikian didasarkan pada sebuah argumentasi, bahwa ekonomi syariah telah dapat memenuhi semua persyaratan yang dituntut agar sah

diklasifikasikan sebagai sebuah sistem ekonomi sebuah bangsa atau negara.



Gambar 2. Sistem ekonomi sosialis dan ekonomi syariah

**Uang Menurut Mazhab Ekonomi Syariah dan Sosialis**

Ekonomi syariah menganjurkan penggunaan uang sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi, karena Rasulullah SAW telah menyadari kelemahan dari transaksi barter atau bai'al muqayyadah, di mana barang atau komoditas saling dipertukarkan secara langsung. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat penukaran dan bukan sebagai komoditas dagangan. Motif utama di balik permintaan uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (demand for transaction), bukan untuk spekulasi atau permainan risiko tinggi, yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Masudul Alam Choudhury, uang merupakan standar penilaian atas aktivitas riil yang dilakukan pelaku ekonomi dan mencerminkan transaksi barang dan jasa dalam masyarakat. Oleh karena itu, uang harus digunakan dalam kegiatan nyata dan

produktif, bukan untuk spekulasi yang tidak mendatangkan manfaat dan sering kali merugikan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, uang berfungsi sebagai flow concept (konsep aliran) dalam perekonomian, yang berarti semakin cepat uang beredar dan berputar dalam kegiatan ekonomi, semakin tinggi pula pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ibn Khaldun menyebutkan bahwa uang memiliki tiga fungsi utama: sebagai standar nilai, sebagai alat tukar (medium of exchange), dan sebagai penyimpan kekayaan. Fungsi-fungsi ini harus dikembangkan aktif dalam kegiatan ekonomi, bukan dibatasi atau dipolitisir.

Sebaliknya, pandangan ekonomi konvensional dan sosialisme memandang uang sebagai komoditas dan seringkali memberikan bunga (riba) atas deposito atau pinjaman. Golongan sosialisme beranggapan bahwa uang adalah komoditas yang memiliki karakteristik

yang sama dengan barang dagangan, dan mereka cenderung melegalkan bunga sebagai bagian dari sistem keuangannya. Ekonomi sosialis sering kali mengabaikan aspek moral dan etika, dan kerap menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekayaan serta krisis ekonomi yang berulang yang disebabkan oleh praktik rent-seeking dan intervensi negara yang tidak tepat. Dari segi kelembagaan, ekonomi syariah menekankan bahwa uang harus beredar secara aktif dan digunakan secara nyata dalam kegiatan riil ekonomi, seperti melalui mekanisme zakat, infak, dan wakaf yang mendukung pemerataan dan keadilan sosial. Hal tersebut berbeda dengan sistem ekonomi sosialis yang cenderung memusatkan kekuasaan ekonomi dan menghapus hak kepemilikan pribadi, sehingga mengurangi insentif untuk berusaha dan berinovasi. Secara keseluruhan, ekonomi syariah dan ekonomi sosialisme berbeda mendasar dalam landasan moral dan kepemilikan. Ekonomi syariah berbasis pada hukum dan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip halal dan larangan riba. Sedangkan ekonomi sosialisme lebih mengedepankan kepemilikan kolektif negara dan menganggap hak milik pribadi sebagai hambatan keadilan sosial.

### **Sektor Riil Ekonomi Dalam Ekonomi Syariah dan Sosialis**

Peran ekonomi syariah untuk pada sektor riil ekonomi semakin signifikan, hal tersebut dapat ditandai dengan keberpihakan korporasi internasional yang semakin beralih ke pembiayaan berbasis syariah. Dewasa ini, ekonomi dan keuangan syariah telah berkembang dengan begitu pesat sehingga investor Uni Eropa dan AS dan dibelahan dunia lainnya mereka tertarik untuk berinvestasi, dan untuk membangun kekuatan ekonomi disektor riil maka *loss sharing* model ekonomi keuangan syariah sebagai sebuah solusi alternatif diabad ini.

Ekonomi yang berbasis syariah misalnya, pola penyaluran dana di sektor riil yaitu dengan berupa pembiayaan dengan skim Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dan berbagai macam produk syariah lainnya. Dalam hubungannya dengan mengatasi masalah kemiskinan institusi keuangan syariah yang berbasis *islamic micro finance* misalnya Baitul Maal wa Tamwil memiliki pinjaman *qardhul hasan* (dana sosial). Sementara itu, golongan masyarakat ekonomi sosialis telah menciptakan sebuah sistem perdagangan ekonomi dunia yang semu karena total transaksi perdagangan dunia yang jumlahnya jutaan dolar

AS ternyata 95% terjadi pada perdagangan pasar uang, dan tidak ada hubungannya dengan pergerakan sektor ekonomi riil. Hanya ada porsi 5% dari jumlah total peredaran uang yang bergerak pada transaksi disektor riil ekonomi. Aliran sosialis berbasis keuangan dan terpisah dengan sektor riil ekonomi, kaum sosialis menjadikan bunga pada uang sebagai jantung dari pada sektor keuangannya. Dalam prakteknya, ekonomi sosialis dalam aktifitas ekonominya di sektor riil telah banyak menimbulkan permasalahan besar ditengah masyarakat, misalnya terjadi ketidakadilan dalam berbagai macam aktivitas ekonomi masyarakat yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat, ketidakstabilan sistem ekonomi yang ada, malah menimbulkan berbagai gejala dalam aktifitas ekonomi dimasyarakat.

### **Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Sosialis.**

Dalam praktiknya, ekonomi berbasis syariah sangat berbeda secara signifikan dari ekonomi konvensional maupun ekonomi sosialisme. Ekonomi syariah, secara prinsip, bertolak belakang dengan sistem sosialis yang menempatkan hampir seluruh tanggung jawab dan pengelolaan ekonomi kepada negara atau kolektif masyarakat. Sistem ekonomi syariah telah menetapkan aturan dan ketentuan tertentu mengenai objek transaksi yang halal dan haram, serta memberikan landasan moral dan hukum berbasis Al-Qur'an dan sunnah. Misalnya, dalam ekonomi syariah, pola perdagangan dan jasa harus mengikuti prinsip keadilan, tidak mengandung riba, dan mengedepankan zakat, infak, sedekah, serta wakaf sebagai instrumen sosial dan redistributif yang sah menurut syariat. Selain itu, ekonomi syariah mampu menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan menegakkan rasa kekeluargaan serta solidaritas sosial. Melalui mekanisme seperti zakat dan infak, ekonomi syariah berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan yang membantu mengurangi kesenjangan dan kemiskinan di tengah masyarakat. Firman Allah dalam Surah Ar Rum ayat 39 menyatakan bahwa riba tidak akan menambah keberkahan, sementara zakat dan sedekah bertujuan untuk mencari keridhaan Allah dan mendatangkan kebermanfaatannya serta peningkatan pahala bagi yang melakukannya.

Sebaliknya, pandangan ekonomi konvensional termasuk sosialisme menampilkan gambaran yang berbeda secara radikal. Ekonomi sosialis didasarkan pada prinsip kepemilikan kolektif dan kontrol negara terhadap sumber daya

serta kekayaan masyarakat. Sistem ini seringkali menetapkan bahwa seluruh harta dan alat produksi adalah milik negara atau komunitas, yang kemudian diatur oleh negara melalui mekanisme terpusat. Walaupun bertujuan untuk mencapai keadilan dan pemerataan, ekonomi sosialisme sering menimbulkan ketidakadilan praktis karena seringkali menimbulkan ketimpangan kekuasaan dan korupsi dalam pengelolaan negara. Dengan pengelolaan kekayaan dan sumber daya yang sangat terpusat, sistem sosialisme juga menghadapi tantangan besar terkait inovasi dan efisiensi ekonomi. Sebagian besar keuntungan dari aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi di tangan elit penguasa, sementara rakyat biasa menerima bagian yang terbatas. Selain itu, kebijakan harga yang diatur penuh oleh negara sering kali menyebabkan kekurangan atau kelebihan pasokan barang dan jasa, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan cenderung

memperburuk diskriminasi ekonomi di tingkat global maupun nasional.

Secara global, pengaruh sistem ekonomi sosialisme pun terbukti memiliki kekurangan yang nyata. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 80% pendapatan dunia saat ini dikendalikan oleh 20% dari populasi—sebuah ketimpangan besar yang semakin mempertegas ketidakadilan sosial. Sebagian dari distribusi kekayaan yang timpang ini menyebabkan kesenjangan sosial yang ekstrem, ketidakstabilan politik, serta kemiskinan yang meluas. Sistem ini seringkali menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, yang akhirnya membatasi kemampuan masyarakat untuk berkembang secara merata. Selain aspek distributif, sistem ekonomi sosial seringkali mengandalkan jaminan sosial dan bantuan dari negara guna mengatasi ketimpangan yang muncul. Namun, penerapan yang berlebihan dan tanpa prinsip moral yang kuat dapat mengikis inisiatif individu dan perusahaan untuk berinovasi.

**Tabel 2.** Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Sosialis

<b>Ekonomi Islam</b>	<b>Ekonomi Sosialis</b>
Bersumber dari Al-qur'an, As-sunnah, dan ijtihad Berpandangan dunia holistik	Bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia Sosialisme berlandaskan materialisme yang menolak campur tangan agama dalam ekonomi
Kepemilikan individu terhadap uang/modal bersifat nisbi Mekanisme pasar bekerja menurut maslahat	Sosialisme menganggap semua harta sebagai milik negara atau bersama. Sosialisme sering kali membatasi mekanisme pasar, dengan harga yang diatur penuh oleh negara.
Kompetisi usaha dikontrol oleh syariat	Sosialisme sering kali menetapkan suku bunga atau bahkan tidak menggunakannya dalam perencanaan terpusat.
Kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal	Kesejahteraan bersifat jasadiyah Sosialisme berfokus pada kesetaraan ekonomi materi semata.
Motif mencari keuntungan diakui lewat cara-cara yang halal Pemerintah aktif sebagai pengawas, pengontrol, dan wasit yang adil dalam kegiatan ekonomi Pemberlakuan distribusi pendapatan	Motif mencari keuntungan diakui tanpa ada batasan yang berlaku Pemerintah sebagai penonton pasif yang netral dalam kegiatan ekonomi Tidak dikenal distribusi pendapatan secara merata Sosialisme bertujuan untuk menghapus kesenjangan kelas sosial secara paksa.

Ketergantungan yang besar pada peran negara juga dapat menyebabkan birokrasi yang rumit, korupsi, serta efisiensi ekonomi yang menurun karena kurangnya daya saing dan motivasi untuk berinovasi. Dengan memperhatikan perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya berlandaskan pada aspek fisik dan materi, tetapi juga sangat memperhatikan aspek moral dan spiritual. Sistem

ekonomi syariah mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan, yang berasal dari prinsip-prinsip dan ketentuan agama Islam. Sementara itu, ekonomi sosialisme lebih menitikberatkan pada pemerataan secara material dan kolektif, namun sering kali mengabaikan aspek moral dan etika dalam pengelolaan sumber daya dan distribusinya. Berdasarkan tabel tersebut di atas jelas bahwa dalam ekonomi Syariah tidak hanya mempelajari

individu sosial tetapi juga bakat religius mereka. Ekonomi syariah dan ekonomi sosialisme berbeda mendasar pada kepemilikan dan landasan moral. Ekonomi syariah berbasis hukum Islam (halal-haram) yang mengakui kepemilikan pribadi dan pasar bebas, sedangkan ekonomi sosialisme berbasis kepemilikan Negara yang kolektif dan menghapus hak milik pribadi untuk distribusi merata. Ekonomi syariah berfokus pada keadilan sosial dan Tuhan, sedangkan sosialisme berfokus pada kesetaraan material semata.

Perbedaan timbul berkenaan pilihan dimana ekonomi syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan ekonomi konvensional berbasis sosialis dikendalikan oleh kepentingan sesat. Ekonomi syariah memadukan kebebasan individu (seperti kapitalisme) dengan tanggung jawab sosial (seperti sosialisme), namun tetap ekonomi di bawah aturan moral agama Islam. Dengan demikian, gambar di atas secara gamblang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam hal paradigma, dasar fondasi mikro dan landasan filosofisnya antara ekonomi yang berbasis syariah Islam dan ekonomi konvensional yang berbasis aliran atau mazhab sosialis.

#### IV. PENUTUP

Ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang mampu mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam rangka mencapai kemakmuran serta mendistribusikan kekayaan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari hukum Islam. Dalam kerangka ini, konsep "money demand for speculation" tidak dikenal karena praktik spekulasi dilarang secara tegas oleh syariat. Selain itu, harta dalam ekonomi syariah dipandang sebagai objek zakat, dan transaksi ekonomi baik berupa perdagangan maupun jual beli dilakukan tanpa melibatkan unsur riba, yang diharamkan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, sistem ekonomi sosialisme didasarkan pada paradigma materialisme yang menolak campur tangan agama dalam urusan ekonomi. Sistem ini cenderung membatasi mekanisme pasar, dengan harga-harga diatur secara penuh oleh negara, dan sering kali menghapus atau membatasi penggunaan suku bunga dalam perencanaan ekonomi terpusat. Tujuan utama sosialisme adalah pencapaian kesetaraan ekonomi secara material, termasuk penghapusan ketimpangan kelas secara paksa. Akan tetapi, penerapan sistem ini berpotensi menimbulkan berbagai kelemahan, seperti berkurangnya dinamisme dan inovasi akibat

minimnya kompetisi, serta ketergantungan yang berlebihan terhadap peran negara yang dapat memunculkan potensi birokrasi dan korupsi. Selain itu, efisiensi ekonomi cenderung menurun karena minimnya insentif untuk meraih keuntungan dalam kerangka ekonomi yang dikendalikan secara ketat oleh negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahmed, "Global Financial Crisis: An Islamic Finance Perspective" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2010.
- Anis B, dan Karnaeen A. Perwataatmadja, *Jejak Rekam Ekonomi Islam* Jakarta: Cicero Publishing, 2008
- A.C. Masudul, "Impossibility Theorems" of Islamic Economics" *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2012.
- Amalia, Euis, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka A 2005.
- Abdullah, and M. S. J. Uddin, and Abdullah "The Effectiveness of Micro Finance Institutions in Alleviating Poverty: The Case of Bangladesh's Grameen Bank and BRAC" *Journal of Social and Development Sciences*, 2013.
- A. Karim, Adimarwan, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta. Raja Grafindo, 2009
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Islamic Micro-finance Initiatives to Enhance Small and Medium-sized Enterprises*, in Greg Fealy and Sally White (eds), *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*. ISEAS, Singapore, 2008.
- Aziz, Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008
- Jakarta, Tazkiya Institut, 2002.
- AB Ghani, AB. Mukmin, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, Kuala Lumpur: PNMB, 1999.
- Chapra, M. Umar, *The Future of Economies an Islamic Perspective* Terjemahan, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Fathi Usman, Abdul Karim, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, dalam bukunya Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*,

- Mannan, Abdul, *Islamic Economic Theori and Practice*, terjemahan, Yogyakarta: Dana Bakti Waqaf, 1997.
- M. A. Choudhury, *Money in Islam: A Study in Islamic Political Economy*, (London and New York:, Routledge, 1997.
- Yuliana, *Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Usman, Abdul Karim, *Sistim, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.



Copyright© 2026. Sofyan Abas.

